

B-15

13

**PANCASILA, TRANSNASIONALISME
DAN
KEDAULATAN NEGARA**

EDITOR :

Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D

Manunggal K. Wardaya S.H., LL.M

Mirza Satria Buana S.H., M.H, Ph.D

LKIS

PANCASILA, TRANSNACIONALISME DAN KEDAULATAN NEGARA

Editor:

Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D

Manunggal K. Wardaya S.H., LL.M

Mirza Satria Buana S.H., M.H, Ph.D



**The Centre for Human Rights
Multiculturalism and Migration**

University of Jember, Indonesia

PANCASILA, TRANSNASIONALISME DAN KEDAULATAN NEGARA

Al Khanif, Manunggal K. Wardaya, Mirza Satria Buana (editor)

@CHRM2 UNEJ, LKiS, 2018

xii + 270 halaman: 15,5 x 23 cm

1. Pancasila 2. Transnasionalisme 3. Kedaulatan Negara

ISBN: 978-602-6610-67-6

Editor: Al Khanif, Manunggal K. Wardaya, Mirza Satria Buana

Penyelaras Bahasa: Sonia Candra Dewi

Perwajahan Sampul/Buku: Noril Camelia

Setting/Layout: Noril Camelia dan Ayu Megawati

Penerbit & Distribusi:

LKiS

Salakan Baru No. I Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194

Faks.: (0274) 379430

<http://www.lkis.co.id>

e-mail: lkis@lkis.co.id

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember

Cetakan I: 2018

Percetakan:

LKiS

Salakan Baru No. I Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 417762

e-mail: lkis.printing@yahoo.com

DAFTAR ISI

Pengantar Editor → v

Daftar Isi → ix

BAB I PANCASILA, KOSMOPOLITANISME DAN TRANSNASIONALISME → 1

Sila Persatuan Indonesia dalam Miskonsepsi Identitas Geo-
kultural: Perspektif Hubungan Antarnegara → 1

Baiq Wardhani

Nasionalisme Indonesia dalam Era Globalisasi: Sebuah Refleksi
Historis → 17

Abubakar Eby Hara

Pancasila sebagai Instrumen Penekan Transnasionalisme
Ekonomi dan Hukum Internasional → 45

Mirza Satria Buana

BAB II PANCASILA DAN MULTIKULTURALISME DALAM ARUS IDEOLOGI TRANSNASIONAL → 63

Revitalisasi Pancasila Di tengah Arus Globalisasi → 65

Mahathir Muhammad Iqbal

Antara Transnasionalisme Wahhabi, Pancasila dan Kedaulatan
Negara → 79

Nurrudin Al Akbar

Problematika Multikultural Dan Konstruksi Pancasila → 127

Moh. Irmawan Jauhari

Tafsir Pancasila dan Masa Depan Agama-Agama di Indonesia → 150
Al Khanif

BAB III PANCASILA DAN KONSEP KEDAULATAN NEGARA → 165

Eksistensi Sistem Ekonomi Pancasila di Era Liberalisasi Ekonomi
→ 167
Sadhu Bagas Suratno

Pancasila dan *Original Intent* Norma Konstitusi yang Tidak Dapat
Diubah (*Unamendable Articles*) dalam Perubahan UUD 1945 → 185
Luthfi Widagdo Eddyono

Parameter Bernegara Bangsa Indonesia Berdasarkan Pancasila → 205
Lukman Hakim

BAB IV MERAJUK KEINDONESIAAN DALAM KONSEP PANCASILA → 221

Membumikan Pancasila Sebagai Ideologi Pembangunan
Indonesia → 222
Firma Novi Anggoro

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Falsafah Huma Betang
di Kalimantan Tengah Dalam Rangka Menangkal Dampak Negatif
Transnasionalisme → 241
Rico Septian Noor

Keadilan Sosial bagi Perempuan Pengidap HIV/AIDS di
Indonesia → 254
Paulus Eko Kristianto

Daftar Kontributor → 269

Nasionalisme Indonesia dalam Era Globalisasi: Sebuah Refleksi Historis

Abubakar Eby Hara

Pendahuluan

Nasionalisme adalah konsep yang lahir dari negara-negara Barat. Seperti juga konsep negara, konsep nasionalisme dirumuskan berdasarkan pengalaman negara-negara Barat. Dalam paper ini, konsep-konsep ini akan disesuaikan dengan pengalaman di dunia ketiga yang berbeda dari pengalaman Barat. Tidak ada definisi yang *fix* tentang nasionalisme. Definisi nasionalisme yang umum biasanya berkaitan dengan loyalitas dan kecintaan pada bangsa lebih daripada kecintaan pada bangsa ataupun lembaga internasional lainnya. Definisi demikian sering disamakan dengan patriotisme. Nasionalisme bahkan sering dianggap penyebab perang¹ Nasionalisme juga berkaitan dengan kedaulatan, dengan hak mengatur diri sendiri, dan dengan identitas nasional yang dilandaskan pada ciri-ciri bersama seperti budaya, bahasa, ras, agama, tujuan politik dan keturunan yang sama.² Semua unsur ini dalam level yang berbeda memang berkaitan dengan nasionalisme. Dalam paper ini, karena itu elemen-elemen ini dianggap sebagai ciri-ciri dan sifat nasionalisme.

Dari berbagai tulisan, para pakar nasionalisme memang membedakan dua aspek nasionalisme. Aspek pertama adalah ciri-ciri atau sifat nasionalisme, sedangkan aspek kedua adalah tentang pengelolaan ciri-ciri tersebut oleh elit dan tokoh-tokoh nasionalis baik dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Dalam paper ini kedua aspek ini dipandang saling melengkapi untuk memahami perkembangan nasionalisme di Indonesia.

¹ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/nationalism>

² Anna Triandafyllidou, "National identity and the other". *Ethnic and Racial Studies*. 21 (4), 1998; A.D. Smith, *The Ethnic Revival in the Modern World* (Cambridge University Press, 1981).

Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

Berkaitan dengan sifat dan ciri nasionalisme dalam definisi di atas, para pakar mengelompokkannya dalam dua konsep utama yaitu *civic nationalism* dan *nativist* atau *ethnic nationalism*.³ Sifat utama dari *civic nationalism* adalah inklusif dan terbuka untuk semua elemen masyarakat. Nasionalisme demikian juga dilihat bersesuaian dengan nilai-nilai liberalisme seperti kebebasan, toleransi, kesederajatan dan hak-hak individu. Para pendukungnya, menyebutkan pentingnya identitas nasional karena identitas demikian memberi makna bagi kehidupan yang otonom dan bermakna. Masyarakat demokrasi juga memerlukan identitas nasional agar berfungsi dengan baik.⁴

Nasionalisme etnik selain berangkat dari kesamaan etnis, bisa juga berangkat dari bahasa, kebiasaan dan tradisi, dan agama. Dalam nasionalisme jenis ini seringkali bangsa sudah ada terlebih dahulu baru kemudian negara tercipta. Pecahan-pecahan Uni Soviet dan Yugoslavia yang kemudian menjadi beberapa negara kecil menunjukkan model negara yang tercipta dari bangsa-bangsa yang memiliki kesamaan etnis yang sudah ada sebelumnya. Ini misalnya dapat dilihat dari negara-negara seperti Serbia, Bosnia dan Montenegro dari bekas Yugoslavia. Armenia, Kazakhtan dan Uzbekistan untuk menyebut beberapa contoh pecahan Soviet. Nasionalisme jenis ini memiliki kesamaan emosional yang kuat yang menjadi landasan bagi terbentuknya negara.

Dalam perkembangannya, nasionalisme jenis terakhir ini juga sering dibagi menjadi apa yang dikenal dengan nasionalisme sekuler dan religius.⁵ Nasionalisme sekuler sering dihubungkan dengan kelompok-kelompok non-agama terutama Islam yang punya pandangan kebangsaan berbeda dengan kelompok yang menghubungkan nasionalisme dengan religiusitas. Nasionalisme Indonesia belakangan juga sering disorot dari sisi asal usul etnisnya. Beberapa pendukung separatisme misalnya mempertanyakan kesahan integrasi wilayah seperti Timor Timur, Aceh dan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Mereka melihat secara etnis dan agama, yang dibuktikan dengan

³ Michael Ignatieff, *Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism* (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1995).

⁴ David Miller, *On Nationality* (Oxford: Oxford University Press, 1995).

⁵ Lihat misalnya Mark Juergensmeyer, *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State* (University of California Press, 1993). Buku ini berusaha melihat kemunculan aktivitas keagamaan dan perlawanannya terhadap modernitas sekuler.

pemisahan Timor Timur, daerah-daerah itu tidak *legitimate* untuk menjadi wilayah Indonesia.

Dalam prakteknya, realitas pembentukan negara-negara tentu tidak sesederhana kedua konsep besar di atas. Bangsa-bangsa dengan etnis dan agama yang sama belum tentu berhasil menjadi satu negara. Bangsa Arab adalah contoh yang nyata, dimana di situ ada satu bangsa tetapi terdapat banyak negara. Demikian juga sebaliknya, negara yang berbeda bangsa bisa melahirkan suatu negara. Negara-negara bekas penjajahan umumnya mengalami nasib yang seperti ini. India, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia dan Singapore adalah contoh negara *multicultural* dan *multi-religious* tetapi bisa membentuk sebuah negara yang sama.

Melihat kenyataan ini, konsep *ethnic* dan *civic nationalism* mempunyai keterbatasan. Kedua konsep itu dapat menjelaskan sumber-sumber dan sifat nasionalisme. Namun perkembangan nasionalisme itu sendiri sehingga terbentuk negara memerlukan analisis lain. Teoritisi nasionalisme seperti Benedict Anderson, misalnya mencoba mengisi gap ini. Ia menguraikan lahirnya nasionalisme Indonesia sejalan dengan perkembangan kapitalisme terutama media cetak. Anderson melihat pentingnya peran elit dan pentingnya konsep yang disebut dengan *imagined community* untuk menjelaskan menguatnya perasaan nasionalisme dan kebangsaan yang melekat pada anak bangsa Indonesia.⁶

Salah satu kritik yang umum terhadap konsep-konsep di atas adalah bahwa pengalaman Barat sangat dominan dalam memahami nasionalisme. Di Barat memang kebanyakan nasionalisme tumbuh dari unsur etnisitas dan agama. Maka dari itu penulis seperti Anthony Smith dan John Hutchinson mengatakan pentingnya perasaan etnisitas dalam pembentukan bangsa. Perasaan kesamaan etnis dan juga agama dianggap modal dasar bagi bertahannya suatu bangsa. Beberapa wilayah bekas Eropa Timur dan Uni Soviet, semuanya hampir mengikuti alur kesamaan etnis dan agama. Ini misalnya dimulai dari Ceko dan Slawakia, di Yugoslavia ada Bosnia dan Serbia, kemudian di bekas Uni Soviet ada Ukraina, Belorusia, Uzbekistan, Azerbaijan yang kesemuanya mengikuti alur kesamaan etnis dan/atau agama.

Dalam keadaan demikian, *civic nationalism* yang terbuka kelihatannya lebih tepat untuk melihat kasus Indonesia. Nasionalisme Indonesia, seperti umumnya di kebanyakan negara terjajah, muncul

⁶ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Verso 2006).

dari kalangan elit dan mendapatkan tempat di masyarakat dalam jaringan sosial mereka dan karena adanya perasaan ketertindasan dan ketimpangan yang mereka alami. Kesadaran nasionalisme yang diperkenalkan oleh kalangan terdidik di Indonesia tumbuh karena perasaan tertindas yang memunculkan persamaan nasib di kalangan rakyat. Nasionalisme pada saat itu identik dengan semangat pembebasan dari ketertindasan dan lahirnya cita-cita tentang Indonesia sebagai bangsa dan negara yang terhormat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya.

Tulisan Anderson bahwa bangsa adalah hasil dari imajinasi dalam konteks ini juga perlu dilihat secara kritis. Imajinasi tentang bangsa dalam konsep Anderson tetaplah mengacu pada model bangsa-bangsa yang tersedia dalam pengalaman Barat. Pengalaman Barat itu menjadi semacam modul yang dapat dipilih oleh negara-negara dunia ketiga. Tetapi, peranan para nasionalis untuk berkreasi sebagai subyek seperti dikatakan Partha Chatterjee sering diabaikan. Chatterjee lebih lanjut mengkritik bahwa bukan hanya kekayaan dunia ketiga dieksploitasi dan dijajah, imajinasi bangsa-bangsa ini juga selamanya dijajah. Ia mengatakan: 'Even our imaginations must remain forever colonized'.⁷

Klaim Chatterjee tidak hanya sebagai kritik akademik tetapi juga dapat ditunjukkan dalam realitas perkembangan nasionalisme di dunia ketiga termasuk di Indonesia. Berdasarkan kritik ini, kita bisa melihat nasionalisme Indonesia terutama pada awal terbentuknya sebagai nasionalisme yang tidak hanya mengikuti modul yang ada di Barat, tetapi menyangkut berbagai isu seperti Bahasa (Indonesia) yang menjadi bagian penting perkembangan nasionalisme Indonesia, budaya, dan sekolah tradisional seperti pesantren yang punya semangat sendiri. Nasionalisme Indonesia juga sering mengikuti jalannya sendiri seperti diperlihatkan dalam perdebatan yang kuat tentang bentuk negara dan arah politik luar negeri. Anak bangsa ini pernah membayangkan sebuah model negara integralistik dengan reference pada nilai-nilai tradisional tentang pandangan sentralistik kekuasaan Jawa. Sebagian juga membayangkan tentang model negara Islam. Dalam politik luar negeri, pidato Bung Hatta yang sangat terkenal yang kemudian dirumuskan dalam kata-kata "mendayung antara dua karang" adalah sebuah

⁷ Partha Chatterjee, 'Whose Imagined Community', dalam Gopal Balakrishnan (ed.), *Mapping the Nation* (London: Verso, 1999), hal. 216.

imajinasi dan tuntutan untuk menjadi subyek yang berbeda dengan Barat di dunia internasional.

Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa konsep Anderson memang bisa menjelaskan tentang asal dan perkembangan nasionalisme namun seperti kata Chatterjee peran para nasionalis sebagai subyek lebih kompleks daripada sekedar mengikuti 'modul' tentang contoh nasionalisme di Barat. Kalau hanya sekedar mengikuti modul atau contoh di Barat tentu nasionalisme itu tidak menemukan dukungan yang kuat dari kalangan akar rumput dengan semangat keindonesiaan yang mulai tumbuh. Kompleksitas pengalaman Indonesia dan dunia ketiga ini perlu dicatat karena ia membedakannya dengan pengalaman nasionalisme di Barat.

Konsolidasi Nasionalisme dan Kedaulatan

Pengalaman dunia ketiga yang kompleks dalam hal nasionalisme dapat dilihat dari bagaimana mereka menghadapi ancaman domestic dan global. Negara-negara Barat yang relative homogen secara budaya, etnis dan bahasa tidak mengalami masa-masa sesulit di dunia ketiga karena berbagai masalah persatuan telah terselesaikan ketika mereka menjadi sebuah negara. Sementara negara-negara dunia ketiga merupakan warisan administrasi colonial yang seringkali tidak homogen secara budaya, sejarah, agama dan Bahasa yang dikemudian hari merupakan potensi konflik.

Sebelum membahas perkembangan nasionalisme di Indonesia lebih lanjut, tulisan ini ingin menguraikan lebih dahulu bagaimana konsep nasionalisme telah dimaknai ketika berhadapan dengan berbagai persoalan negara di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, muncul berbagai kelompok separatis sementara di luar negeri, globalisasi telah menggoyahkan sendi-sendi kedaulatan negara dan mengganti nasionalisme dengan kesetiaan lain. Perlu dicatat disini bahwa perkembangan nasionalisme yang semakin elitis semakin menempatkan konsep itu dalam taruhan terutama karena tuntutan primordialisme dan tuntutan globalisasi yang menyebabkan kesetiaan terhadap negara menjadi berkurang.

Di dunia ketiga perjuangan kemerdekaan adalah satu hal penting, tetapi upaya menjadi persatuan negara yang baru merdeka itu lebih penting dan kompleks. Dalam konteks ini, nasionalisme dianggap

Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

sebagai suatu kata kunci dan roh untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan. Anderson menjelaskan bahwa nasyon atau bangsa adalah hasil dari imajinasi orang-orang yang membayangkan mereka berada dalam satu negara dan merasakan persamaan nasib serta memiliki mitos tentang masa lampau bersama yang jaya. Nasionalisme, menurutnya, berkembang karena perkembangan teknologi media cetak yang menyebarkan kesadaran kebangsaan itu.⁸

Nasionalisme kemudian meluas dan diterima sebagai sesuatu yang seharusnya diadopsi oleh semua warga, dan bahkan sebagian orang menganggap lahirnya negara seperti Indonesia sebagai berkah dan karunia dari Tuhan. Dalam kadar tertentu memang kemudian ada aspek religius dari tiap nasionalisme. Pada awal perjuangan kemerdekaan sebagian masyarakat Muslim menganggap berjuang melawan penjajah adalah juga tugas agama dan jihad. Tetapi lebih dari itu kesadaran untuk rela berkorban dan mati sebagai *martyr* untuk negara, adalah juga bersifat religius dalam pengertian religiusitas yang lebih luas.

Namun apapun cara pandang kita, pada mulanya dan dalam perkembangannya di kemudian hari, nasionalisme adalah sebuah proyek elitis dari kalangan terdidik. Pada elit terdidik ini lah yang melakukan konsolidasi nasionalisme dan kedaulatan. Pada mulanya nasionalisme digunakan untuk membakar semangat rakyat untuk merdeka dan bersatu. Kemudian setelah merdeka, nasionalisme menjadi milik para penguasa untuk memperkuat bangsa dan negara serta kadang-kadang untuk kepentingan pemerintahannya sendiri. Bila negara sudah merdeka, nasionalisme diperlukan untuk memperkuat kedaulatan dan untuk melindungi kedaulatan dari apa yang mereka sebut dengan 'ancaman intervensi asing'. Memang ciri utama nasionalisme seperti dikatakan oleh Nenad Miscevic menyangkut (1) kepedulian terhadap identitas nasional, dan (2) upaya untuk mencapai atau mempertahankan kedaulatan politik negara.⁹

Dalam konsolidasi nasionalisme, negara dan kedaulatan ini, para elit penguasa mengklaim bahwa identitas negara dianggap mutlak dan tidak dapat diganggu oleh negara lain dalam hal apapun. Di tangan para

⁸ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London, Verso, 1983.

⁹ Nenad Miscevic, 'Nationalism' in Edward N Zalta (ed), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2014, Metaphysics Research Lab, Stanford University 2014) <<https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/nationalism/>> accessed 22 May 2018.

elit politik kedaulatan menjadi sangat dekat dengan nasionalisme dan harga diri bangsa. Ungkapan yang paling sering terdengar adalah kecaman terhadap bangsa dan negara lain 'yang menginjak-nginjak harga diri bangsa'. Ini kemudian melahirkan pembelaan terhadap bangsa atau dengan kata lain memunculkan perasaan nasionalisme untuk menentang mereka yang menginjak kedaulatan bangsa itu. Kedaulatan dalam konteks ini juga dimaknai sebagai 'harga diri' bangsa. Kedaulatan sering juga disamakan dengan keutuhan bangsa. Berdaulat berarti kita dapat mengontrol semua wilayah teritorial dari campur tangan asing dan dari gerakan separatisme di dalam negeri. Atas nama kedaulatan segala bentuk intervensi dan separatisme menjadi sah untuk dibasmi termasuk dengan kekuatan militer.

Dalam konteks ini, di tangan para penguasa politik, kedaulatan menjadi alat *sensitive* dan ampuh untuk memobilisir massa dan mendorong nasionalisme. Penguasa rejim otoriter, menggunakan prinsip ini untuk menolak setiap campur tangan asing terhadap pemerintahan mereka terutama yang menyangkut masalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Para penguasa ini berlindung di balik prinsip kedaulatan dan non-intervensi untuk melawan tekanan internasional ini.

Namun konsolidasi negara-negara dunia ketiga dalam perkembangan globalisasi sering mengabaikan esensi kedaulatan sebagaimana diungkapkan dalam teori kedaulatan klasik. Sebuah negara dianggap berdaulat kalau mereka sudah mengkonsolidasi diri, *sustainable* dan kuat. Kedaulatan demikian oleh Robert Jackson disebut dengan kedaulatan positif dalam pengertian negara itu punya kemampuan dan kebebasan untuk melakukan sesuatu (*freedom to*), sementara negara yang di luar kategori ini hanya menggunakan jaminan hukum internasional untuk mempertahankan kedaulatan. Negara-negara seperti ini dianggap berdaulat secara pasif dan diistilahkan dengan *freedom from*.¹⁰ Mereka bebas dan berdaulat karena memang ada hukum internasional di dalam masyarakat internasional yang melindungi mereka dari ancaman intervensi.

Sehabis perang dingin, negara-negara dunia ketiga melakukan konsolidasi kedaulatan negatif ini untuk melawan tekanan Barat dalam hal pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan demokrasi. Kedaulatan mendapatkan signifikansi baru dalam konteks ini ketika negara-negara

¹⁰ Robert H. Jackson, *Quasi-states: Sovereignty, International Relations and the Third World* (Cambridge: Cambridge University Press 1991).

seperti Cina, Indonesia dan ASEAN pada decade 1980an bersatu melawan tekanan Barat terhadap apa yang mereka anggap campur tangan dalam urusan dalam negeri mereka. Sebelum ini ASEAN sendiri dibentuk untuk membangun solidaritas yang kuat melalui prinsip saling menghormati dan tidak campur tangan pada urusan internal negara anggota yang lain. Dengan terbentuknya ASEAN ancaman dan ambisi teritorial satu negara terhadap kedaulatan Negara lain menjadi reda dan diselesaikan dalam 'cara ASEAN' ('ASEAN way').¹¹

Perkembangan dalam praktek politik dunia ketiga ini menunjukkan bahwa negara-nasionalisme-kedaulatan berkembang menjadi tiga konsep saling terkait berhubungan timbal balik secara erat satu sama lain tidak terpisahkan bahkan saling memperkuat. Kedaulatan menjadi kuat karena ada nasionalisme yang pada gilirannya akan memperkuat *state* dan pemerintahan yang sedang berkuasa. Sementara pemerintah menggunakan prinsip kedaulatan dan nasionalisme untuk kepentingan konsolidasi politik ke dalam dan juga ke luar. Eratnya hubungan antara ketiganya membuat ketiadaan salah satu dari prinsip itu akan melemahkan prinsip yang lainnya.

Ancaman Globalisasi terhadap Nasionalisme dan Kedaulatan

Dalam perkembangannya, konsolidasi nasionalisme dan kedaulatan di negara-negara dunia ketiga terus mendapat tantangan. Selain tantangan dari ikatan-ikatan primordial, tantangan yang tidak kalah seriusnya adalah ancaman globalisasi. Globalisasi meliputi banyak wilayah seperti ekonomi, politik, teknologi dan budaya. Yang paling mengkhawatirkan adalah pengaruh nilai-nilai yang dibawa oleh globalisasi terhadap kedaulatan negara dan nilai-nilai nasionalisme. Globalisasi meredefinisi nasionalisme, tetapi ia sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan harus dihadapi. Era globalisasi telah memunculkan kepentingan-kepentingan baru dan juga artinya kesadaran baru. Kesetiaan orang bukan lah pertama kali pada bangsa tapi kepada keuntungan ekonomi dan bisnis.

¹¹ Dengan demikian ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang berbeda dengan Uni Eropa dimana disini justru mereka mentransfer sebagian kedaulatan untuk badan baru kerjasama regional yang dapat melayani kepentingan bersama mereka secara lebih baik.

Sekarang muncul pandangan bahwa 'materi tidak mengenal nasionalisme'. Karena uang para pengusaha tidak peduli apakah negara dan rakyatnya akan hancur. Dalam krisis keuangan di Indonesia misalnya, para pengusaha melarikan modal dan uang ke luar negeri dan membiarkan pemerintahan hancur dan anak negeri menderita.

Demikian juga dalam bidang pendidikan, dalam hal lingkungan hidup, dan dalam masalah nilai-nilai HAM, referensi orang adalah kepada nilai-nilai dan standar universal yang juga sering disebut nilai-nilai kosmopolitanisme. Negara hanya menjadi semacam tidak lebih dari tempat tinggal atau tempat persinggahan. Sementara apakah orang bekerja, melakukan sesuatu dan mengabdikan, apakah untuk negara atau kepentingan lain yang lebih luas tidak lagi menjadi persoalan.

Bila kita membicarakan keterbatasan peran negara ini maka pembicaraan terhadap kosmopolitanisme untuk mengatasi ketegangan antara globalisasi versus nasionalisme dan kedaulatan, menjadi tidak terelakkan. Berbeda dengan globalisasi yang merupakan fenomena external yang mempengaruhi definisi dan pemaknaan tentang negara, kedaulatan dan nasionalisme para elit, maka kosmopolitanisme berangkat dari analisis teori politik yang dicoba untuk diperluas ke dalam politik internasional oleh beberapa penulis seperti Charles Beitz¹², Andrew Linklater¹³, Paul Keal¹⁴ dan beberapa penulis lainnya.

Berbeda dengan globalisasi ekonomi neoliberal yang memiliki makna negatif bagi golongan kiri seperti gerakan anti globalisasi, maka kosmopolitanisme memiliki makna yang lebih netral bila tidak dapat dikatakan positif. Pengikut faham ini meyakini adanya suatu nilai-nilai kemanusiaan universal yang merupakan hasil kesepakatan bersama mayoritas pendukung agama-agama, nilai-nilai dan budaya yang berbeda. Menurut kosmopolitanisme semua makhluk manusia, tanpa memandang afiliasi politik mereka, merupakan satu masyarakat bersama yang harus terus dihidupkan. Kemanusiaan yang universal ini bukan suatu yang mustahil karena perkembangan dunia sekarang yang tidak mengenal batas dunia dan karena ketidakmampuan negara sendiri dalam mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dianggap 'internal' di negara itu. Munculnya istilah demokrasi cosmopolitan dari David

¹² Charles Beitz, *Political Theory and International Relations* (Princeton, NJ: Princeton University Press 1979).

¹³ Andrew Linklater, *Men and Citizens in the Theory of International Relations* (London: Macmillan, 1990).

¹⁴ Paul Keal, *Ethics and Foreign Policy* (Allen & Unwin and the ANU, 1992)

Held¹⁵ dan menguatnya tuntutan '*humanitarian intervention*' terhadap negara-negara yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, di kalangan negara anggota PBB, merupakan dua contoh menguatnya faham kosmopolitanisme.¹⁶

Secara mendasar esensi kosmopolitanisme berbeda dengan semangat tentang peran negara dalam definisi kalangan realis. Bagi para pendukung realis, negara mendorong orang supaya tidak campur urusan negara lain. Dalam konteks negara, perilaku negara mendapat pembenaran dari teori-teori realis dalam hubungan internasional yang mengasumsikan negara sebagai aktor-aktor yang egois yang bedaulat dan mengejar kekuasaan untuk kekuasaan. Negara juga dilihat sebagai *single actor* yang utuh dan nampak tidak mempunyai masalah di dalamnya.

Pada pihak lain kosmopolitanisme mendorong orang untuk peduli akan nasib orang lain. Para pendukung faham ini percaya akan humanisme universal yang merupakan sintesa dari berbagai nilai dan budaya di dunia. Setiap agama misalnya memiliki nilai universal yang diterima oleh pengikut agama lainnya. Gerakan-gerakan cosmopolitan muncul menjadi aktor internasional baru yang memperjuangkan etika global tentang hak-hak asasi, demokrasi, perang dan damai. Deklarasi PBB tentang HAM universal misalnya adalah salah satu contoh dari upaya demikian, demikian juga berbagai konvensi PBB tentang hak-hak wanita, anak-anak, suku terpeceh, konservasi lingkungan dll, berangkat dari asumsi akan adanya kemanusiaan universal yang harus dilindungi. Kepekaan internasional yang kuat terhadap penderitaan orang Aceh yang terkena bencana Tsunami adalah contoh konkrit aspek kosmopolitanisme yang kuat di dunia.

¹⁵ David Held, 'Cosmopolitan Democracy and the New International Order', Ch 12 *Democracy and the Global Order* (Cambridge: Polity, 1995)

¹⁶ Para teoritis politik sejak awal memang mengkritik faham kedaulatan mutlak yang diletakkan pada konsep kedaulatan. Filosof seperti Hugo Grotius, Alberico Gentili, dan Francisco Suarez misalnya mengakui kedaulatan Negara tetapi menurut mereka kedaulatan itu harus dibatasi. Di dunia internasional misalnya ada norma-norma internasional. Saat itu seorang pangeran yang kejam misalnya bisa mengalami tindakan penghukuman dari Negara-negara tetangga, suatu faham yang sama dengan prinsip intervensi kemanusiaan seperti sekarang. Dan Philpott, 'Sovereignty', dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2003, <http://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/> diakses 20 Juli 2005.

Dalam konteks kosmopolitanisme, kita berbicara tentang hal yang lebih konkrit daripada sekedar pengaruh globalisasi yang seringkali destruktif terhadap negara. Globalisasi bersifat menghancurkan dan seringkali menimbulkan respon reaktif yang bersifat kekhawatiran akan hilangnya identitas diri sebagai bangsa. Kosmopolitanisme tidak menolak globalisasi bahkan merupakan bagian dari proses globalisasi nilai-nilai. Fahaman ini melihat ada solusi yang dapat dilakukan baik dalam konteks negara bangsa maupun dalam konteks global.¹⁷ Kosmopolitanisme mengkritik kegagalan negara bangsa untuk memenuhi janji kedaulatan sebagaimana dalam pengertian klasik untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi warga, dan mencari solusi untuk masalah-masalah itu dalam level internasional.

Persoalan yang dihadapi negara bangsa seringkali berasal dari ketidakmampuan menciptakan negara yang kuat dan pemerintahan yang baik, namun kadangkala juga karena memang kapasitas negara tidak memungkinkan penyelesaiannya tanpa campur tangan internasional. Berkaitan dengan ketidakmampuan negara, banyak literature yang telah membahas hal ini. Salah satunya adalah tiadanya *good governance* dan kegagalan menciptakan iklim demokrasi di negara itu. Negara itu kadangkala terpuruk pada level yang disebut *failed states* seperti negara-negara di Afrika yang juga memerlukan campur tangan asing seperti *humanitarian intervention* atau bahkan intervensi militer untuk mengakhiri konflik bersenjata.

Karena kepedulian dan titik tolak dari kosmopolitanisme adalah individu bukan negara, maka kepedulian pertama adalah pada hak-hak individu. Ini tidak berarti bahwa negara ditolak keberadaannya oleh fahaman ini, melainkan diletakkan pada fungsinya untuk memenuhi hak-hak dan kesejahteraan individu. Bila negara tidak mampu maka dimungkinkan adanya institusi internasional untuk membantu negara mengatasi persoalan-persoalan dan kepentingan individu itu.

Ketegangan juga sering terjadi ketika para elit penguasa merasakan kepentingan dan pengabdian dari warganya bertentangan dengan apa yang mereka anggap kepentingan bangsa yang biasanya didefinisikan dengan kepentingan kedaulatan dan persatuan bangsa. Sebagai kelompok yang merasa menjadi pengawal persatuan dan kebangsaan,

¹⁷ Lebih lanjut lihat Molly Cochran, 'Cosmopolitanism and communitarianism in a post-Cold War World', dalam John Macmillan and Andrew Linklater (eds.), *Boundaries in Question, New Directions in International Relations* (London: Pinter Publishers, 1995).

Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

seringkali kelompok elit mengklaim sebagai pemilik kebenaran dan memberangus mereka yang dipandang mengancam persatuan.

Kelompok-kelompok swadaya masyarakat biasanya sering dianggap sebagai kelompok yang melayani kepentingan asing dan mengancam persatuan. Kelompok non pemerintah ini berbicara hak-hak asasi manusia, pentingnya pemilihan yang jujur dan pemberantasan korupsi, dan hak-hak orang untuk mengeluarkan pendapat dan berbicara dan menentukan masa depannya sendiri yang kemudian ditunjukkan dengan pembelaan terhadap kelompok-kelompok di daerah yang tertindas. Namun mereka ini sering dianggap melayani kepentingan asing yang ingin menghancurkan republik ini. Elit pemerintahan memiliki kata kunci untuk menentukan apa yang benar dan salah, dan kadangkala mereka mendapat dukungan yang luas dari kalangan elit lain yang mengklaim sebagai pengawal negara dan nasionalisme. Sebaliknya semakin kuat orang bersuara anti separatisme, semakin keras sikap auda terhadap kelompok-kelompok "penentang republik", semakin berkoar-koar seseorang tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, maka semakin orang itu dianggap sebagai 'nasionalis tulen'.

Namun dalam arus globalisasi ini elit pemerintahan tidak bisa mengklaim kebenaran ini terus menerus. Mereka perlahan-lahan tergusur dan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan global kalau ingin bertahan. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap mereka yang didiskriminasi dan tertindas telah menjadi nilai global, walaupun kadangkala diiringi oleh kepentingan politik negara besar. Walaupun banyak orang menyadari kepentingan Barat dan ketidakadilan dalam berbagai isu di dunia, namun tekanan global akan penerapan hak-hak asasi itu merupakan realitas yang harus dihadapi oleh negara-negara yang masih otoriter.

Perkembangan Nasionalisme Indonesia dari Masa ke Masa

Dalam perkembangannya, pandangan *civic nationalism* yang menjadi akar persatuan sebelum kemerdekaan di atas rumpaknya tidak sepenuhnya berjalan seperti yang dibayangkan Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya. Tantangan di dalam negeri dan globalisasi telah menyebabkan nasionalisme bukan hanya milik segelintir orang dan didefinisikan oleh elit, tetapi juga digunakan sebagai alat politik ke

dalam negeri untuk menindas siapa yang dipandang tidak nasionalis dan di luar negeri digunakan untuk justifikasi agar negara-negara asing tidak campur tangan terhadap masalah dalam negeri seperti HAM dan demokrasi.

Tantangan pertama terhadap cita-cita nasionalisme terbuka itu sering dilihat dari perdebatan tentang bentuk negara yaitu dari kelompok Islam yang ingin mendirikan negara yang berlandaskan Islam dan kalangan nasionalis yang ingin mempertahankan negara sekuler berdasarkan Pancasila. Ini dijadikan patokan untuk menganalisis kesadaran kebangsaan atau perasaan nasionalisme bangsa.¹⁸ Kemudian muncul perlawanan-perlawanan kedaerahan seperti PRRI/Permesta untuk menuntut kemerdekaan. Negara nampaknya tidak berhasil mengakomodasi berbagai kelompok yang kecewa karena aspirasi mereka tidak dipenuhi. Perkembangan ini seolah-olah menjustifikasi adanya etnik-etnik atau agama tertentu yang berhak untuk mengklaim Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia. Orang misalnya bisa menyebut nasionalisme Timtim, nasionalisme Aceh, nasionalisme Islam, nasionalisme Kristen dsb.

Presiden Soekarno pada masa Orde Lama nampaknya ingin mengakomodasi konflik ini dengan ide NASAKOM yang berusaha merangkum semua aliran ideologis dominan di Indonesia. Berdasarkan asumsi ini, bentuk nasionalisme Indonesia semasa Presiden Sukarno adalah kelanjutan dari semangat revolusioner pada masa perjuangan kemerdekaan, dengan peran pemimpin nasional yang lebih besar. Nasionalisme itu mengandaikan adanya ancaman musuh dari luar terus menerus terhadap kemerdekaan Indonesia. Ancaman itu disebutkan berasal dari imperialisme dan kolonialisme dari negara-negara kapitalis dan kemudian negara-negara yang dimasukkan dalam *Old Established Forces (Oldefos)*. Ancaman itu kemudian ditunjukkan dari masalah dikuasainya Irian Barat oleh Belanda dan terbentuknya Federasi

¹⁸ Syamsudin Haris misalnya membagi perpolitikan Indonesia dalam katagori berikut. Haris mempetakan 24 partai itu menjadi enam aliran ideologis, yaitu : 1). Islam, terdiri dari PBR, PBB, PKS, PPP dan Partai Persatuan Nahdliatul Ummah Indonesia, 2). Nasionalis Religius, terdiri dari PKB dan PAN, 3). Nasionalis Sekuler, PDI-P, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme, PNBK, PPDI {Dimmy Haryanto}, 4). Nasionalis Pragmatis, di antaranya Golkar, PKPB {R. Hartono}, PKPI {Edi Sudrajat}, Patriot Pancasila, Partai Demokrat dan PPD {Oesman Sapt}, 5). Sosialis Demokrasi, seperti PIB, Partai Merdeka {Adi Sasono}, PBSB {Mochtar Pakpalian}, PSI dan Partai PDK {Ryas Rasyid}, 6). Kristen, Partai Damai Sejahtera {Ruyandi Hutasoit}.

Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

Malaya sebagai bagian dari proyek imperialisme Barat. Kedua bentuk ancaman itu kemudian dihadapi dengan mobilisasi massa untuk membebaskan Irian Barat dan setelah itu kampanye ganyang Malaysia.

Dalam kajian politik, proyek nasionalisme Soekarno adalah proyek elitis. Nasionalisme digunakan untuk mengatasi berbagai konflik dan kesulitan yang dihadapi oleh negara baru merdeka. Konflik politik internal ditandai dengan rivalitas yang meningkat antara militer dan kalangan komunis diatasi dengan seruan untuk melawan ancaman dari luar. Masyarakat disodorkan dengan cita-cita dan bayangan tentang kegemilangan Indonesia untuk melupakan sementara persoalan riil yang dihadapi oleh bangsa dan negara seperti masalah ekonomi, pemerintahan dan pembangunan.

Seperti pada masa perlawanan terhadap penjajahan, proyek nasionalisme elitis ini masih mempunyai gema yang kuat di masyarakat. Kepiawaian Soekarno sebagai seorang *solidarity maker* dalam istilah Herbert Feith mempersona massa untuk bersatu, bahkan berlomba untuk menunjukkan perasaan nasionalisme mereka. Kondisi internasional ketegangan Timur Barat dan masih tertundanya banyak negara di dunia ketiga oleh penjajahan menjadi lahan subur bagi politik flamboyant Soekarno untuk bergema di dunia internasional. Ini menambah kredibilitas Indonesia di dunia internasional dan artinya kebanggaan bagi bangsa baru merdeka bernama Indonesia.

Hasilnya seperti nasionalisme pada masa revolusi, pada masa Soekarno, nasionalisme memiliki *appeal* yang sangat kuat dengan berbagai ritual tentang kejayaan masa lalu dan kebencian terhadap Barat. Masyarakat bahkan menganggap Soekarno sebagai Ratu Adil yang datang untuk menyelamatkan mereka. Kerelaan berkorban yang muncul menunjukkan kuatnya aspek transdental dari nasionalisme ini. Nasionalisme pada masa Soekarno dengan demikian bersifat romantik.

Tahap selanjutnya dari nasionalisme di Indonesia adalah pada masa Orde Baru. Pada masa ini, memang Indonesia menjadi bagian dunia internasional dalam bidang ekonomi, tetapi dalam bidang politik, para elit pemerintah tetap lah pemegang definisi nasionalisme. Nasionalisme agaknya resmi menjadi ideologi dan alat negara untuk melawan dan medeskreditkan mereka yang anti pemerintah baik terhadap ancaman yang dianggap datang dari dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri nasionalisme identik dengan persatuan dan kesatuan. Kelompok oposisi atau mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah disingkirkan karena akan mengancam persatuan dan

stabilitas. Perbedaan diredam bukan dengan menyelesaikan pokok persoalannya tetapi ditindas dan disembunyikan dibawah karpet.

Dalam hubungan luar negeri, nasionalisme berarti kedaulatan, integritas dan identitas bangsa. Tekanan agar ada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, demokrasi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pada masa Orde Baru dianggap sebagai campur tangan asing terhadap kedaulatan RI. Nilai-nilai universal itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai bangsa atau demokrasi Pancasila yang juga didefinisikan secara sepihak oleh penguasa Orde Baru. Untuk masalah kedaulatan ini, pada saat itu Indonesia berkoalisi dengan Negara-negara yang memiliki masalah dengan hak-hak asasi manusia seperti beberapa Negara ASEAN dan Cina, untuk melawan apa yang disebut dengan campur tangan asing terhadap kedaulatan negara.

Jadi berbeda dengan pandangan awal nasionalisme, nasionalisme Orde Baru kehilangan ruh kemanusiaan untuk melawan penindasan. Nasionalisme didefinisikan oleh negara tanpa ada konsultasi dan kesesuaian dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat. Masyarakat lah yang harus menyesuaikan dengan definisi nasionalisme negara bila ingin selamat dan mempunyai peran dalam negara Orde Baru.

Namun agaknya upaya negara Orde Baru ini tidak berjalan dengan mulus. Berlawanan dengan upaya negara itu, semasa periode yang bisa disebut sebagai pasca-Orde Baru, nasionalisme mulai mengalami redefinisi di kalangan masyarakat sejalan dengan perubahan kebijakan pemerintahan yang mengintegrasikan Indonesia ke dalam dunia internasional dalam bidang ekonomi. Bila nilai-nilai dan kearifan lokal tertindas oleh mesin asimilasi budaya Orde Baru, kesadaran kemanusiaan sebagian masyarakat tetap terasah karena globalisasi dan informasi dan karena keterlibatan dalam kegiatan ekonomi dan politik internasional.

Dengan bergabungnya Indonesia dalam sistem global internasional, perdebatan tentang nasionalisme sampai sekarang menjadi sangat menarik. Definisi nasionalisme yang hanya mengambil aspek anti asing masih tetap kuat. Tetapi definisi ini agaknya dipandang semakin sempit dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Terdapat argumen bahwa Indonesia yang kuat secara ekonomi akan memperkuat kedaulatan bangsa dan akan membuat Indonesia sejajar dengan bangsa moderen lainnya. Kebanggaan akan bangsa dan negara akan kuat seiring dengan kuat dan moderennya negara dan bangsa Indonesia. Untuk tujuan itu mau tidak mau Indonesia harus bergabung dan

mencontoh negara-negara yang sudah maju dan moderen di dunia yakni negara-negara kapitalis Barat.

Karena itu lah tidak mengherankan salah satu perdebatan tentang nasionalisme Indonesia sampai saat ini berputar pada soal nasionalisme ekonomi dan liberalisasi ekonomi Indonesia.¹⁹ Kelompok nasionalis menuduh kalangan yang meliberalkan ekonomi Indonesia dengan menjual berbagai perusahaan ke pihak asing, tidak nasionalis dan akan membuat Indonesia di bawah dominasi asing. Dalam pandangan ini, kita kehilangan kebebasan dan terperangkap pada kapitalisme. Bagian demi bagian negeri ini kemudian akan dikuasai oleh orang asing. Kedaulatan dan harga diri kita menjadi terinjak-injak.

Pada pihak lain beberapa kalangan lain terutama kalangan ekonom memandang liberalisasi ekonomi Indonesia adalah bagian tidak terelakkan dari globalisasi ekonomi yang tidak ada hubungannya dengan nasionalisme dalam pengertian kelompok pertama. Bagi mereka, Indonesia harus menyesuaikan dengan tuntutan pasar internasional dan harus siap bersaing menghadapinya. Kelompok terakhir ini secara eksplisit tidak pernah berbicara tentang nasionalisme. Tetapi apakah ini berarti mereka tidak nasionalis lagi? Dalam pengertian nasionalisme, chauvinisme ala Orde Lama, tentu saja mereka tidak nasionalis. Seiring dengan globalisasi dan tuntutan akan nilai-nilai global termasuk kapitalisme dan demokrasi, telah muncul generasi baru terutama di kalangan muda. Kelompok-kelompok generasi baru ini yang lahir karena modernisasi dan globalisasi kebijakan pembangunan Orde Baru, semakin membesar dan merupakan realitas yang agaknya perlu difahami tersendiri dalam kaitan dengan nasionalisme.

Keterikatan mereka tidak lagi secara sempit pada tanah air Indonesia. Budaya mereka tidak lagi terutama budaya lokal tapi budaya Barat, musik dan film Barat, juga musik dan film India, kadang-kadang juga telenovela dari Amerika Latin. Mereka menikmati semua yang berbau "asing". Dalam bidang politik dan hak-hak asasi, mereka mengecam perlakuan sewenang-wenang terhadap kelompok yang dilabeli "separatis". Mereka berdagang dengan siapa saja tanpa mengenal batas negara.

¹⁹ Revisond Baswir, 'Nasionalisme Ekonomi', *Republika*, 2 Juni 2003. Lihat juga, 'Menggagas Kedaulatan Individu', *Media Indonesia*, 26 Desember 2003.

Dengan kata lain sebenarnya kita sedang melihat tumbuhnya aktor-aktor dan anak-anak bangsa yang semakin kosmopolit. Mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai persaudaraan global dan universal. Mereka memiliki semangat patriotisme tetapi tidak terbatas pada membela negara tetapi juga membela kepentingan individu dan manusia yang lebih luas. Negara adalah penting sebagai tempat tinggal, seperti tempat lahir yang dirindukan untuk berkumpul dan bergurau,²⁰ tetapi cara berfikir dan pembelaan mereka adalah pada kemanusiaan global.

Kecendrungan ini tidak terjadi hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dulu di mana-mana orang membela Nelson Mandela sebagai pejuang kebebasan di Afrika Selatan dan membenci George Bush, Presiden AS yang suka perang. Seluruh masyarakat dunia peduli dengan penderitaan rakyat Aceh karena bencana Tsunami. Bantuan datang dari berbagai kalangan masyarakat sampai pada anak-anak sekolah. Patriotisme mereka melewati batas negara, yaitu pada kemanusiaan universal.

Di Indonesia, negara sentralistik, terkontrol dengan satu definisi nasionalisme tidak mampu mengatur semua daerah sehingga harus memberikan otonomi pada daerah-daerah. Ini artinya memberikan kesempatan kepada aktor-aktor di daerah secara langsung untuk menjadi aktor kosmopolit. Ini memudahkan mereka menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional. Seperti pada masa Jalan Sutera yang juga melewati kawasan Nusantara, sebuah dunia kosmpolitan terbentuk karena perdagangan tapi bisa juga menjadi jaringan sistem intelektual dan agama dengan wilayah-wilayah lain. Nusantara sebetulnya terutama mereka yang tinggal di pesisir, karena posisinya geografis yang strategis dan masyarakatnya yang dinamik, sejak lama sebenarnya adalah masyarakat kosmopolit.

Dalam konteks dan kecendrungan global ini, semakin banyak orang membayangkan menjadi warga dunia (*world citizen*) dan terikat pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena itu lah nilai-nilai dan semangat generasi Baru produk modernisasi dan globalisasi sekarang tidak dapat difahami dalam pengertian lama nasionalisme, yaitu cinta dan pembelaan kepada tanah air secara total bahkan transendental. Nilai-nilai, semangat dan patriotisme mereka mestinya difahami dalam

²⁰ Arief Budiman, "Nasionalisme Rentan Terhadap Manipulasi", wawancara Tempo Interaktif, <http://www.tempointeraktif.com/harian/wawancara/waw-ariefbudiman01.html>, diakses Juni 2005.

Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

semangat pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan global. Tentu saja tidak semua nilai-nilai global kondusif untuk menciptakan nilai-nilai kemanusiaan global. Tidak semua kelompok generasi itu mengusung perjuangan untuk menegakkan universalisme nilai kemanusiaan.

Mesti dibedakan di sini misalnya gaya hidup Barat dengan nilai-nilai universal seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia dan etika dalam kapitalisme. Nasionalisme dalam pengertian sempit dan klasik peninggalan Negara Orde Baru di atas berada dalam keadaan kucar kacir (*disarray*) dan dengan demikian harus didefinisi. Nasionalisme negara Orde Baru terasa sempit karena melihat segala sesuatu yang di sekitar negeri ini penuh dengan ancaman. Refleksi dari pandangan sempit tentang nasionalisme misalnya dapat dilihat dalam kutipan berikut:

'Cobalah baca fiksi-fiksi Indonesia mutakhir, khususnya setelah 1990-an. Cobalah simak puisi-puisi anak-anak muda kita sekarang. Cobalah saksamai sinetron-sinetron yang bergentayangan di televisi kita. Cobalah dengar teriakan anak-anak muda di jalanan. Adakah sesuatu yang disebut nasionalisme Indonesia diperjuangkan? Adakah yang disebut nasionalisme menjadi sesuatu yang penting? Maaf, dengan berbesar hati dan berlapang dada, harus saya katakan, ternyata tidak. Tidak ada itu nasionalisme Indonesia.... Nasionalisme dalam pengertian identitas kebangsaan sungguh menjadi dekaden, dan sangat mungkin tidak diperlukan lagi.'²¹

Agaknya sulit mengharapakan atau memaksa generasi sekarang dan akan datang di Indonesia untuk berteriak "merdeka atau mati" karena zaman telah berubah dan musim telah berganti.

Namun sayangnya definisi *mainstream* tentang nasionalisme, seperti dikatakan oleh Santoso masih berasumsi bahwa nasionalisme adalah terutama anti penjajahan atau anti-ancaman kekuatan asing. Walaupun ancaman asing untuk mengoyak kedaulatan Indonesia tidak konkrit, rezim Orde Baru, misalnya, tetap membuatnya nyata dalam wacana persatuan. Seperti dikatakan dimuka nasionalisme itu direduksi dalam kacamata kedaulatan bangsa dan negara, menjaga batas negara, mengamankan negara dari ancaman dari luar dan dari dalam. Nilai-nilai

²¹ Alfitra Salamm, 'Biarlah Nasionalisme Keindonesiaan Penuh', *Media Indonesia*, 28 Oktober 2004.

universal demokrasi dan hak-hak asasi bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan identitas negara. Negara atau kelompok yang melakukan itu dianggap sebagai campur tangan asing.

Jika tidak diredefinisi, maka nasionalisme ini akan terlihat –seperti dikatakan oleh Aboepriyadi Santoso, sebagai nasionalisme *mashocistis* yang serba takut, suatu nasionalisme *schizofrenia* dan *xenophobia*.²² Reaksi terhadap segala permasalahan bangsa pun terasa brutal. Santoso memberikan contoh tentang hal ini:

“Lihat misalnya reaksi kekerasan tentara di Timor Timur ketika mereka harus hengkang September tahun 99, kekagetan dan trauma publik ketika kita kehilangan pulau pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002, kesembarangan Jakarta dengan memaksakan pemekaran Papua dengan semangat divide et impera tahun 2003 dan tengok pula jingoisme, semangat yang terbakar dalam kasus perairan Ambalat Maret lalu, dll.”

Perkembangan nasionalisme Indonesia dari masa ke masa ini bisa disederhanakan dalam table berikut ini. Ada beberapa komponen yang dapat disimpulkan dari perkembangan nasionalisme yaitu bagaimana negara mendefinisikan nasionalisme, hubungan elite massa, pandangan tentang kedaulatan, tema-tema dan sifat nasionalisme.

Tabel. Isu-isu, ciri-ciri dan tahap-tahap nasionalisme Indonesia

Isu\ Periode	Pra/awal kemerdekaan	Masa Soekarno	Masa Soeharto	Pasca-Orde Baru
Proses pendefinisian nasionalisme	Bersama	Negara	Negara	Bersama
Hubungan elit-massa	Dialog elit-massa	Pemimpin dominan	Dominasi negara	Dialog global elit-massa
Hubungan dengan kedaulatan	Tanah air diperjuangkan	Tanah air diperjuangkan	Menjaga kedaulatan	Tanah air sebagai bagian dari dunia

²² Aboepriyadi Santoso, 'Haus Perang? Apa Latar Belakangnya', Radio Nederland Wereldomroep, 10 June 2005.

-an				
Tema-tema dalam nasionalisme	Kesederajatan, kebebasan universal	Harga diri bangsa, anti imperialisme dan anti kolonialisme	Melawan campurtangan asing; ancaman terhadap pesatuan dan kedaulatan	Nasionalisme dengan semangat kemanusiaan universal
Sifat	Revolusioner-humanistik	Revolusioner-romantik	Xenophobia-Developmentalist	Humanistik-kosmopolit

Table di atas tentu saja mengandung penyederhanaan terhadap realitas kompleks perkembangan nasionalisme di Indonesia. Namun secara garis besar dari periode pemerintahan yang digambarkan ciri-ciri yang ditampilkan sedikit banyak merefleksikan suasana umum pada periode tertentu. Pada periode saat ini dimana terdapat keterbukaan sistem politik, kemungkinan suatu nasionalisme yang terbuka seperti dibayangkan oleh Soekarno menjadi mungkin dilakukan.

Relevansi Pemikiran *Civic Nationalism* dan Globalisasi

Dalam mengisi nasionalisme pasca Orde Baru, pemikiran tokoh-tokoh bangsa pra maupun setelah kemerdekaan tetap menunjukkan relevansinya buat Indonesia. Walaupun tidak secara penuh, sebagian ide nasionalisme yang terkandung dalam Pancasila terutama pada pemikiran Bung Karno adalah lebih dekat dengan *civic nationalism* daripada *ethnic* atau *religious nationalism*. Kita perlu melihat bagaimana keberadaan cita-cita *civic nationalism* ini dalam nasionalisme Indonesia dalam berhadapan dengan globalisasi dan kosmopolitanisme dewasa ini.

Ide *civic nationalism*, paling jelas muncul dalam artikel Soekarno "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" di tahun 1926. Dengan mengutip Renan ia mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia adalah:

“...suatu nyawa, suatu azas-akal, yang terjadi dari dua hal: pertama-tama rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat; kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukannya pula batas-batas negeri yang menjadikan ‘bangsa’ itu...Bangsa adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal-ikhwal yang telah dijalani oleh rakyat itu.”²³

Kutipan itu jelas menunjukkan bahwa pilihan Soekarno tentang nasionalisme bukanlah nasionalisme sempit seperti di sebagian negara Eropa yang berdasarkan ikatan emosional etnis, suku atau agama, tetapi nasionalisme yang terbuka berdasarkan riwayat hidup rakyat yang sama dan keinginan membangun mimpi bersama ke depan.

Bukan lah suatu kebetulan bahwa Presiden pertama Indonesia, Soekarno dalam pidato yang dikenal dengan pidato kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945, juga telah berbicara tentang bagaimana berhadapan dengan nilai-nilai global kosmopolitan ini dan apa pengaruhnya pada negara-negara merdeka dan berdaulat. Ia mengakui pentingnya nilai-nilai global kemanusiaan atau dikenal juga dengan nilai-nilai cosmopolitan namun pada saat yang sama ia tetap mengandalkan pentingnya peran negara kebangsaan Indonesia dalam konteks global itu. Seperti dikatakannya nasionalisme Indonesia harus menyelamatkan pri kemanusiaan. Ia menyebut nasionalisme demikian dengan sosionasionalisme dengan prinsip humanisme yang tidak didasari pada supremasi ras, warna kulit maupun agama tertentu. Ia mengatakan:

“Nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang sempit; ia bukanlah nasionalisme yang timbul dari pada kesombongan bangsa...ia adalah nasionalisme yang lebar-nasionalisme yang timbul daripada pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat; ia bukanlah ‘jingo-nationalism’ atau chauvinisme. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang di dalam kelebaran dan keluasannya memberi tempat cinta pada lain-lain bangsa, sebagai lebar dan luasnya

²³ Soekarno, ‘Nasionalisme, Islamisme, Marxisme’ (Suluh Indonesia Muda, 1926), dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, 1965, hal. 3.

Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

udara, yang memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup."²⁴

Dinamika hubungan antara elit dengan rakyat, dan perbedaan tentang konsep nasionalisme itu sendiri di kalangan elit menunjukkan kompleksitas nasionalisme bangsa Indonesia sebagai subyek untuk menentukan masa depan sendiri. Kedekatan antara pemimpin dengan rakyat pada saat itu juga membantu perkembangan faham nasionalisme. Seperti dikatakan Bung Hatta bulan Oktober 1951:

"Ekonomi dan kebudayaan selalu berjalan bersama... Apabila kita mau membangun dalam berbagai lapangan ekonomi, maka kita berhadapan dengan berbagai soal, yang sebagian boleh dikatakan terletak dalam lapang kebudayaan. Selain soal pikiran dan ciptaan yang menjadi motor pembangunan ekonomi, kita hadapi juga soal-soal yang mengenai jiwa, perasaan, serta kebiasaan rakyat. Adakalanya berbagai hal yang kemudian ini menjadi halangan bagi aktivitas dalam pembangunan ekonomi... Sifat kultur ialah memelihara, memupuk. Barang-barang kultur yang dibangun dipupuk supaya subur tumbuhnya, untuk memberikan hidup yang lebih mulia kepada manusia".²⁵

Nasionalisme mendapat tempat dengan cepat di kalangan rakyat karena sebelumnya di masyarakat memang sudah ada lembaga-lembaga dan nilai-nilai budaya dan agama yang di dalamnya antara lain berisi semangat memperjuangkan persamaan dan keadilan. Hal ini misalnya tercermin dalam perdebatan nilai-nilai tentang nasionalisme antara Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soetatno Soerjokoesoemo. Menurut penelitian Takashi Shiraisi, sebagaimana yang dilaporkan oleh Kurniawan:²⁶

²⁴ Soekarno, 'Sekali Lagi Tentang Sosio - Nasionalisme dan Sosio - Demokrasi', dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, 1965.

²⁵ Dikutip dalam Jakob Sumarjo, 'Nasionalisme Indonesia Baru Perspektif Budaya', *Pikiran Rakyat*, 11 Juli 2004.

²⁶ Takashi Shiraisi, "'Satria' vs 'Pandita'", Sebuah Debat dalam Mencari Identitas", dalam Akira Nakazumi (editor), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang (Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, diambil dalam Kurniawan, 'Diskursus Nasionalisme: Artefak Masa Lalu di Panggung Masa Kini', http://www.geocities.com/z_ivan/catatan_filsafat_artefak.html, diakses Juni 2005.

'Tjipto mendirikan Budi Utomo dan Indische Partij, sedang Soetatmo mendirikan Komite Nasionalisme Jawa. Debat itu diterbitkan tahun 1918 dalam bentuk selebaran berjudul *Javaansche of Indische Nationalisme*. Soetatmo memajukan nasionalisme Jawa yang dipandanginya lebih jelas dalam landasan bahasa dan kebudayaan untuk sebuah bangsa. Dalam cara pandang ini, Soetatmo mengusulkan peran pandito sebagai pencipta ketertiban dalam kekacauan pergerakan dengan memperbaiki hubungan kawulo-gusti, rakyat menjadi kawulo sang pandito ratu. Di seberangnya berdiri Tjipto dengan nasionalisme Hindia dengan penitisan jiwa satrio sejati, yaitu keluhuran moral, melalui perlawanan tanpa kompromi terhadap penindasan dan pemerasan Belanda para priyayi terhadap rakyat.'

Kemampuan dan kearifan pemimpin untuk memelihara dan memupuk semangat kebangsaan telah menjadi kekuatan besar dari nasionalisme Indonesia. Dalam perdebatan itu pandangan tentang Indonesia yang lebih luas dan integratif mengalahkan pandangan lokal sebagaimana dicerminkan dalam lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.²⁷ Proses perdebatan yang berangkat dari nilai dan kearifan lokal seperti ini membuat nasionalisme itu kemudian tumbuh subur di masyarakat. Penindasan, ketidaksejerajatan dan ketidakadilan agaknya merupakan kata kunci yang melahirkan perlawanan terhadap penjajahan dan munculnya aspirasi tentang sebuah negara merdeka yang sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya. Bila nasionalisme di Barat terbatas pada etnisitas maka di Indonesia berbagai hal seperti budaya, Bahasa dan agama menjadi satu dalam membentuk nasionalisme. Karena itu nasionalisme Indonesia pada mulanya mengandung semua elemen perlawanan dari berbagai nilai. Nasionalisme ini sekaligus, dengan sendirinya, bersifat religius karena membela suatu keyakinan dan kerelaan untuk berkorban bahkan untuk mati demi membelanya.

Suatu pandangan positif perlu dikembangkan dengan menempatkan ancaman nilai-nilai global itu dalam konteks pemahaman Pancasila yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, globalisasi itu mesti dilihat sebagai tantangan nilai-nilai global terhadap Pancasila yang mesti disambut secara terbuka. Lebih khusus lagi, sebuah pandangan positif terhadap nilai-nilai kemanusiaan global atau kosmopolitanisme perlu mendapat perhatian sebagai salah satu

²⁷ Kurniawan, *ibid.*

Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

jalan keluar dilemma globalisasi versus nasionalisme. Dalam konteks ini pemikiran Soekarno dan para tokoh nasional Indonesia mempunyai relevansinya. Sudah saatnya nasionalisme yang kehilangan akar nilai-nilai kearifan lokal ini didefinisi. Dengan kecenderungan globalisasi atau lebih tepatnya menguatkan gerakan kosmopolitanisme di dunia internasional, nasionalisme Indonesia akan menemukan bentuk baru yang manusiawi. Di sini kemudian relevansinya untuk mengangkat kembali pandangan-pandangan awal tokoh kebangsaan tentang nasionalisme ini. Ada baiknya sebagai penutup dikemukakan kembali pandangan Soekarno tentang nasionalisme dan kosmopolitanisme pada pidato kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 berikut ini.

“Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua, yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan “internasionalisme”. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya. Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.”

Kesimpulan

Nasionalisme sampai sekarang dipandang sebagai sesuatu yang positif dan harus didukung. Namun tulisan ini menunjukkan bahwa nasionalisme kadang-kadang hanya melayani kepentingan sekelompok elit saja. Berangkat dari asumsi bahwa nasionalisme pada mulanya adalah gerakan elit dan kalangan terpelajar, tulisan ini melihat bahwa dalam perkembangannya, nasionalisme di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan elit dan negara. Kadangkala nasionalisme itu kehilangan sentuhan pada nilai-nilai dan kearifan lokal

berbeda dengan tahap awal bagaimana nasionalisme itu tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia pra dan beberapa waktu setelah kemerdekaan, sebagaimana yang dituangkan Soekarno dalam berbagai kesempatan terutama pada pidato Pancasila 1 Juni 1945.

Pengaruh globalisasi atau lebih tepatnya nilai-nilai kosmopolitanisme menyadarkan kembali akan pentingnya aspek kemanusiaan dari nasionalisme yang menjadi tumpul karena dominasi negara yang begitu lama terhadap masyarakat sipil di Indonesia. Generasi yang muncul akibat pembangunan dan modernisasi di Indonesia adalah generasi kosmopolit. Mereka berbicara tentang ide-ide kemanusiaan dan hak-hak individu yang tidak memandang batas negara. Bagi mereka nasionalisme jelas bukan dalam pengertian klasik membela negara.

Kalau tidak untuk membela negara lalu seperti apakah nasionalisme mereka, atau mereka tidak memiliki nasionalisme lagi. Nasionalisme telah berkembang menjadi sebuah istilah yang berbeda tergantung siapa yang memegangnya. Namun bila dilihat semangat dan makna nasionalisme awal Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan, nasionalisme itu sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan global. Nasionalisme waktu itu semangatnya universal dan juga melewati batas-batas negara. Perjuangan kebebasan melawan penindasan dan tuntutan kesederajatan adalah hal yang universal.

Jadi kalau masih ada nasionalisme pada saat ini, maka nasionalisme itu haruslah nasionalisme yang kosmopolit. Dalam nasionalisme kosmopolit, peran Negara dan nasionalisme mengalami transformasi. Negara tidak lagi bisa mengklaim kedaulatan mutlak untuk mengatasi berbagai masalah. Dalam mengatasi masalah lingkungan hidup, imigran dan terorisme misalnya, negara bukan saja harus menyerahkan sebagian kedaulatan untuk bekerjasama dengan dunia internasional tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mengatasi isu-isu diatas. Dalam konteks ini isu-isu itu dipandang sebagai ancaman global terhadap masa depan umat manusia.

Cara pandang nasionalisme kosmopolit juga bisa dikembangkan untuk mengatasi kegagalan pemerintah di negara-negara dunia ketiga dalam menciptakan *good governance*. Institusi internasional bisa membantu bahkan mengambil alih peran tersebut. Bahkan dalam banyak kasus negara-negara yang kuat sekalipun, negara-negara itu semakin tidak mampu mengatasi persoalannya sendiri. Ini tentu saja topik lain di luar paper ini yang menarik untuk dibicarakan. Namun

Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

pada intinya kita dapat mengatakan bahwa globalisasi tidak mesti bertentangan dengan nasionalisme. Dalam hal-hal tertentu seperti diuraikan di atas, kesetiaan orang tidak mesti hanya pada negaranya, suatu kemanusiaan yang universal kadangkala lebih penting daripada sekedar nasionalisme sempit.

Daftar Pustaka

- 'Menggagas Kedaulatan Individu', *Media Indonesia*, 26 Desember 2003.
- Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1983).
- Badjeber, Djafar, 'Mengedepankan Islam Substantif' dalam http://www.pbr.or.id/text_isi.php?tab=kolom&nil=Mengedepankan%20Islam%20Substantif&nil1=Mengedepankan%20Islam%20Substantif, diakses July 2005.
- Baswir, Revrison, 'Nasionalisme Ekonomi', *Republika*, 2 Juni 2003.
- Beitz, Charles, *Political Theory and International Relations* (Princeton, NJ: Princeton University Press 1979).
- Budiman, Arief, "Nasionalisme Rentan Terhadap Manipulasi", wawancara Tempo Interaktif, <http://www.tempointeraktif.com/harian/wawancara/waw-ariefbudiman01.html>, diakses Juni 2005.
- Chatterjee, Partha, 'Whose Imagined Community', dalam Gopal Balakrishnan (ed.), *Mapping the Nation* (London: Verso, 1999).
- Triandafyllidou, Anna, "National identity and the other", *Ethnic and Racial Studies*, 21 (4), 1998.
- Smith, A.D., *The Ethnic Revival in the Modern World* (Cambridge University Press, 1981).
- Cochran, Molly, 'Cosmopolitanism and communitarianism in a post-Cold War World', dalam John Macmillan and Andrew Linklater (eds.), *Boundaries in Question, New Directions in International Relations* (London: Pinter Publishers, 1995).

- Held, David, 'Cosmopolitan Democracy and the New International Order', Ch 12 *Democracy and the Global Order* (Cambridge: Polity, 1995).
- Ignatieff, Michael, *Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism* (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1995).
- Jackson, Robert H., *Quasi-states: sovereignty, international relations, and the Third World* (New York: Cambridge University Press, 1990).
- Juergensmeyer, Mark, *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State* (University of California Press, 1993).
- Kcal, Paul, *Ethics and Foreign Policy* (Canberra: Allen & Unwin and the ANU, 1992).
- Kurniawan, 'Diskursus Nasionalisme: Artefak Masa Lalu di Panggung Masa Kini', http://www.geocities.com/z_iwan/catatan_filsafat_artefak.html, diakses Juni 2005.
- Linklater, Andrew, *Men and Citizens in the Theory of International Relations* (London: Macmillan, 1990).
- Miller, David, *On Nationality* (Oxford: Oxford University Press, 1995).
- Miscevic, Nenad, 'Nationalism', *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2003.
- Philpott, Dan, 'Sovereignty', dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2003, <http://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/> diakses 20 Juli 2005.
- Salamm, Alfitra, 'Biarlah Nasionalisme Keindonesiaan Pudah', *Media Indonnesia*, 28 Oktober 2004.
- Santoso, Abocpriyadi, 'Haus Perang? Apa Latar Belakangnya', *Radio Nederland Wereldomroep*, 10 June 2005.
- Shiraishi, Takashi, "'Satria' vs 'Pandita', Sebuah Debat dalam Mencari Identitas", dalam Akira Nakazumi (editor), *Indonesia dalam Kajian Sajana Jepang (Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986).
- Soekarno, 'Nasionalisme, Islamisme, Marxisme' (Suluh Indonesia Muda, 1926), dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, 1965
- Soekarno, Pidato Lahinya Pancasila 1 Juni 1945, <http://www.hariansejarah.id/2017/06/kutipan-pidato-bung-karno-pada-1-juni.html>. Diakses 18 Mei 2018.
- Soekarno, 'Sekali Lagi Tentang Sosio - Nasionalisme dan Sosio - Demokrasi', dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, 1965.

Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

Sumarjo, Jakob, 'Nasionalisme Indonesia Baru Perspektif Budaya',
Pikiran Rakyat, 11 Juli 2004.

Taha, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996).